



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**UNIT KERJA** : RSUD PRAYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HJ. BAIQ ROHATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 410010

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.930.000.000**

1. Tanah Seluas 1096 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 3800 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
3. Tanah Seluas 1395 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah Seluas 2640 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/300 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/180 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 300.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/300 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 205.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOBIL, WULING MP/MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 266.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	366.982.728
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.767.982.728
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.767.982.728

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.